



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAS ADI KOMAR
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
3. NHK : 928458

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/215 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/148 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **224.000.000**

1. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA EX-MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **75.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **308.781.131**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **5.957.781.131**

III. HUTANG **Rp.** **364.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.593.781.131**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.